

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat *Gross Domestic Bruto* saja tetapi melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat diterjemahkan kedalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi yang sejahtera.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11).

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang berupa kepulauan menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang demikian juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana kinerja pembangunan ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator-indikator ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) DIY menunjukkan angka yang baik dan mengalami kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita DIY setiap tahunnya. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami peningkatan mencapai 5,40 persen. Sementara itu, nilai

PDRB DIY atas dasar harga konstan tercatat sebesar 24,567 triliun rupiah dan atas dasar harga berlaku sebesar 63,690 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun yang sama, nilai PDRB perkapita DIY mencapai 6,94 juta rupiah (harga konstan).

Kebijakan otonomi daerah merupakan sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, karena kebijakan ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

Pembangunan dalam lingkup daerah disamping meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia. Ukuran perkembangan pembangunan manusia menggunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tersusun atas indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak.

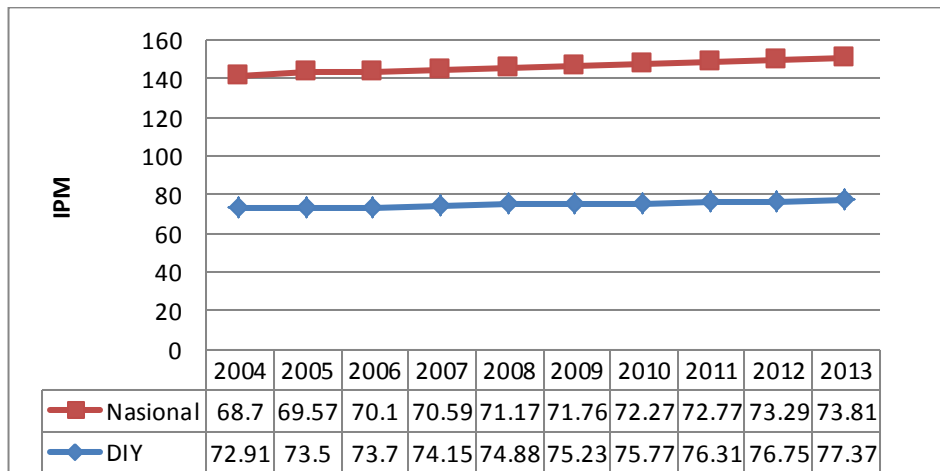
Kuncoro (2004:127) menyatakan pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Terdapat daerah dengan pertumbuhan yang cepat dan daerah dengan pertumbuhan yang lambat. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena Patta (2012), mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian akan berdampak buruk juga terhadap kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Selama kurun waktu 2009-2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,04% per tahun. Kondisi tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi DIY

mencapai 5,04% yang berarti bahwa kinerja perekonomian DIY mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 bahkan merupakan angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 7,81%. Industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil; serta industri furnitur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan yang produksinya sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor.

Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (6,54%) serta sektor pengangkutan dan komunikasi (6,30%). Kemudian disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 6,20% dan 5,57%. Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif terbesar 0,63%.

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah. Bahkan lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena wilayah DIY relatif masih kecil sehingga sumber daya alam yang dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa.



Sumber: BPS DIY 2014, data diolah

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 2004-2013

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Tren dari tahun 2004 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa IPM baik ditingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Pada tahun 2010, IPM DIY sebesar 75,77, sedangkan IPM nasional 72,27. IPM DIY tahun 2011 sebesar 76,31, juga lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun yang sama yang besarnya 72,77. Pada tahun 2012 dan 2013 IPM DIY sebesar 76,75 dan Nasional sebesar 73,29, IPM DIY sebesar 77,37 dan nasional 73,81.

Tabel 1.1
IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013

Kabupaten /Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Hurup (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per kapita Yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Kulon Progo	75,03	93,13	8,37	635,96	75,95	4
Bantul	71,03	92,81	9,02	656,07	79,91	3
Gunungkidul	71,62	85,22	7,79	634,88	71,64	5
Sleman	71,36	95,11	10,55	656,00	80,51	2
Yogyakarta	75,79	98,43	11,56	658,76	80,51	1
DIY	73,62	92,86	9,33	656,19	76,75	4

Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY (data diolah).

IPM menurut Kabupaten/Kota DIY tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,51. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman dengan angka 80,51. Sementara itu, tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Bantul (79,91), Kulon Progo (75,95) dan Kabupaten Gunungkidul (71,64).

Disparitas distribusi investasi antardaerah dapat juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antardaerah. Investor cenderung melakukan investasi pada daerah-daerah maju, karena memudahkan akses pada fasilitas-fasilitas tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antardaerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh**

Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat disparitas pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2013 ?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas antardaerah ?
3. Bagaimanakah pengaruh disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antardaerah ?

B. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui tingkat disparitas pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas antardaerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antardaerah.

C. Batasan Masalah

1. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Definisi ini memiliki tiga komponen utama yaitu : *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan serajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduknya; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. (Boediono, 1999:1).
2. Disparitas pendapatan merupakan adanya heterogenitas dan beragamnya karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Kesenjangan/ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri (kuncoro 2004:133).
3. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat (Todaro 2003).